

“KINERJA PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BEKASI”

Uliyah Helvia*), Puji Astuti), Rina Martini**)**

Email: uliyahhelvia@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang juga menjadi perhatian di Kabupaten Bekasi, mengingat dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bekasi memiliki angka kasus 17,8% di Tahun 2022 dan mengalami kenaikan di Tahun 2023, menjadi 23,2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab fluktuasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi pada periode 2020–2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kinerja Bernardin dan Russell serta teori implementasi program Charles O. Jones. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan, BAPPEDA, DPPKB, DPPPA Kabupaten Bekasi, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mengalami fluktuasi, ditandai dengan penurunan prevalensi stunting pada 2020–2022, tetapi mengalami kenaikan kembali pada 2023. Faktor-faktor utama yang menyebabkan fluktuasi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa langkah intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan anak gizi kurang, belum mencapai target yang ditetapkan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi masyarakat secara intensif, dan optimalisasi sistem monitoring berbasis data. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan angka stunting di Kabupaten Bekasi dapat kembali menurun secara konsisten dan mendukung pencapaian target nasional.

Kata Kunci: Stunting, Program Percepatan Penurunan Stunting, Implementasi Program, Kabupaten Bekasi, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Stunting is a national priority issue that has also garnered attention in Bekasi Regency, considering its impact on human resource quality and sustainable development. Bekasi Regency recorded a stunting prevalence rate of 17.8% in 2022, which increased to 23.2% in 2023. This study aims to analyze the causes of fluctuations and the factors influencing the implementation of the Integrated Stunting Reduction Acceleration Program in Bekasi Regency during the 2020–2023 period.

The research employed a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews and document analysis. The study utilized Bernardin and Russell's performance theory and Charles O. Jones's program implementation theory as its framework. Data were obtained through interviews and documentation involving various stakeholders, including the Health Office, Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), Family Planning and Population Office (DPPKB), Women's Empowerment and Child Protection Office (DPPPA) of Bekasi Regency, posyandu cadres, and program beneficiaries.

The findings reveal that the program experienced fluctuations, marked by a decline in stunting prevalence from 2020 to 2022, followed by an increase in 2023. Key factors contributing to these fluctuations include budget constraints, insufficient cross-sectoral coordination, low public awareness, and technical challenges in program implementation. Additionally, some specific intervention measures, such as providing supplementary food for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (CED) and malnourished children, failed to meet the set targets.

The recommendations derived from this study include strengthening coordination among government agencies, enhancing human resource capacity, intensifying public education efforts, and optimizing data-driven monitoring systems. With these improvements, the stunting prevalence rate in Bekasi Regency is expected to decline consistently, supporting the achievement of national targets.

Keywords: Stunting, Stunting Reduction Acceleration Program, Program Implementation, Bekasi Regency, Public Policy.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu pondasi yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Hak atas kesehatan juga merupakan Hak Asasi Manusia, yang mana artinya setiap individu berhak memperoleh kesehatan yang layak. Di Indonesia, hak kesehatan dilindungi oleh Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Serta Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.

Di Indonesia, masalah kesehatan masih menjadi prioritas bagi pemerintah. Menurut Kemenkes RI dalam Andika, dkk (2022), menyatakan bahwa pemerintah

mengeluarkan enam prioritas program kesehatan nasional, program-program kesehatan nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), strategi pencegahan *stunting*, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penguatan keamanan kesehatan dalam menghadapi pandemi, serta mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan sistem kesehatan nasional masih menghadapi tantangan utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Berdasarkan data UNICEF dan WHO, Indonesia menduduki peringkat ke-27 dari 154 negara dalam hal prevalensi *stunting* dan menempati posisi ke-5 tertinggi di kawasan Asia. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 mencatat angka *stunting* sebesar 21,6 persen. Dalam mengatasi permasalahan *stunting*, pemerintah mencakupnya dalam program

prioritas yang mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menelisik lebih dalam, terjadinya *stunting* tentunya bukan tanpa sebab. Berbagai faktor berkontribusi terhadap *stunting*, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selain itu, kondisi *stunting* pada anak umumnya berkaitan erat dengan berbagai faktor lingkungan dan pengasuhan, seperti praktik pengasuhan yang tidak optimal, kondisi sanitasi dan kualitas air yang buruk, ketidakstabilan pasokan pangan dalam keluarga, serta tingkat pendidikan orang tua yang terbatas.

Di Indonesia, masih terdapat provinsi yang memiliki angka *stunting* yang terbilang tinggi, contohnya Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 49,4 juta jiwa di tahun 2022. Salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki angka prevalensi *stunting* tinggi, yaitu Kabupaten Bekasi.

Tabel 1.1. Angka Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2023

Tahun	Angka Stunting
2020	39,7%
2021	21,5%
2022	17,8%
2023	23,2%

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia, tabel menunjukkan perubahan angka *stunting* di Kabupaten Bekasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, angka *stunting* tercatat sebesar 39,7%, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Angka ini menurun secara signifikan menjadi 21,5% pada tahun 2021 dan terus turun menjadi 17,8% pada tahun 2022, yang merupakan angka terendah dalam rentang waktu yang diamati. Namun, pada tahun 2023, angka *stunting* mengalami peningkatan kembali menjadi 23,2%.

Fluktuasi angka *stunting* ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan selama tiga tahun pertama, tetapi diikuti oleh peningkatan pada tahun terakhir yang diamati. Penurunan pada periode 2020–2022 mengindikasikan keberhasilan awal dari intervensi program percepatan penurunan *stunting*. Namun, peningkatan kembali di tahun 2023 dapat mencerminkan adanya tantangan baru atau kendala dalam implementasi program. Fluktuasi angka *stunting* ini menjadi fokus penting dalam penelitian karena mencerminkan keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab

utama fluktuasi, baik dari aspek program, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* secara terperinci dan jelas guna menciptakan sinergi, integrasi, serta koordinasi yang optimal.

Kembali pada tujuan awal yang ingin diberikan, analisis Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bekasi menjadi topik yang substansial untuk diteliti, melihat fluktuasi angka *stunting* di Kabupaten Bekasi dan relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan serta guna menjamin kualitas hidup manusia di masa mendatang. Harapannya penelitian ini dapat memaparkan mengenai arti pentingnya sebuah program diimplementasikan guna mencapai cita-cita demi kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab fluktuasi prevalensi *stunting* di Kabupaten Bekasi dan

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten Bekasi.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan adalah teori kinerja Bernardin dan Russell serta teori implementasi program Charles O. Jones:

- Teori Kinerja (Bernardin dan Russell): *Quality, Quantity, Timeliness, Cost Effectiveness, Interpersonal Impact.*
- Teori Implementasi Program (Charles O. Jones) : Pengorganisasian, Interpretasi, Penerapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya data yang diperoleh dalam penelitian berbentuk kata-kata dan gambar oleh (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data meliputi, dokumentasi dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan utama dari Dinas Kesehatan, BAPPEDA, DPPKB, DPPPA, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat program. Situs penelitian berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Analisis dan interpretasi data mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk memastikan kualitas

data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan serta informasi dari berbagai narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Kinerja Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi

1. Quality

Program penanganan stunting di Kabupaten Bekasi menunjukkan capaian signifikan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan koordinasi lintas OPD, penggunaan aplikasi data terukur, dan pelaksanaan rebug stunting. Keberhasilan program didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efektif, terutama dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan edukasi masyarakat.

Kualitas program tercermin dari strategi intervensi yang mencakup identifikasi wilayah berisiko, penentuan sasaran prioritas, dan koordinasi lintas sektor. Sistem monitoring komprehensif meliputi pemantauan puskesmas, audit kasus, dan pelaporan terstruktur. Keterlibatan masyarakat melalui posyandu rutin dan pemberian bantuan

langsung menunjukkan pendekatan partisipatif yang efektif.

Meski menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan ekonomi, dan tingkat pendidikan minim, program tetap menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan. Fokus pengembangan diarahkan pada intensifikasi edukasi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan SDM, dan perluasan kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan holistik ini, program memiliki potensi kuat untuk mencapai target penurunan stunting secara signifikan.

2. *Quantity*

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi 2024 menunjukkan tren penurunan kasus stunting, dari 8.100 jiwa (2019) menjadi 9.480 jiwa (2020), hingga 2.997 jiwa (2023), meski ada kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Namun berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi masih mencapai 23,2%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat (21,7%) dan target nasional 2025 (19%). Beberapa target program juga belum tercapai, termasuk PMT ibu hamil,

pemberian ASI Eksklusif, PMT anak kurang gizi, dan balita IDL.

3. *Timeliness*

Analisis indikator timeliness dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bekasi menunjukkan implementasi yang kompleks dengan kebutuhan adaptasi berkelanjutan. OPD telah mengembangkan sistem monitoring berjenjang yang komprehensif, didukung oleh mekanisme pelaporan sistematis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2022. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pendekatan triwulan, bulanan, dan semester.

Meski menghadapi kendala seperti keterlambatan jadwal dan kompleksitas birokrasi, program menunjukkan kemajuan berkat komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan penyesuaian. Tantangan utama mencakup kesadaran orang tua, fleksibilitas jadwal posyandu, dan kemampuan adaptasi tenaga kesehatan. Ketidaksesuaian waktu yang terjadi merupakan bagian dari proses dinamis yang memerlukan pendekatan komprehensif.

4. Cost Effectiveness

Penanganan stunting di Kabupaten Bekasi melibatkan berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD, CSR, dan Baznas) serta program inovatif seperti BAAS dan penempatan LO di setiap kecamatan. Namun, efektivitas biaya program belum optimal karena intervensi yang dilakukan oleh berbagai dinas belum mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, terutama karena kompleksitas faktor urbanisasi dan migrasi penduduk. Meskipun sumber daya telah dikerahkan secara komprehensif, pencapaian efisiensi dan optimalisasi anggaran masih membutuhkan evaluasi mendalam dan strategi yang lebih adaptif.

5. Interpersonal Impact

Program penanggulangan stunting di Kabupaten Bekasi telah berhasil mengembangkan model intervensi yang melampaui pendekatan konvensional melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tercermin dari pendekatan holistik dan partisipatif yang berfokus pada transformasi kesehatan dan kesejahteraan anak.

b. Analisis Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi

1. Pengorganisasian

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bekasi telah membangun struktur koordinasi lintas-instansi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan berbagai OPD, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2022. Meski telah mengembangkan kerangka organisasi komprehensif dengan sistem rapat triwulan dan pelaporan, program menghadapi tantangan berupa ketidakseragaman komitmen kepemimpinan dan keterbatasan SDM, terutama tenaga kesehatan dan kader posyandu yang belum terlatih penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program masih membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, penyelarasan komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM berkelanjutan.

2. Interpretasi

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bekasi diinterpretasikan melalui perspektif OPD dan masyarakat penerima manfaat. SOP yang diatur dalam SK Pembentukan Tim

Percepatan Penurunan Stunting memberikan pedoman penting bagi OPD dalam pelaksanaan program secara terstruktur. Meski ada pedoman jelas, masih terdapat potensi kesenjangan pemahaman antar pelaksana yang memerlukan koordinasi dan komunikasi intensif. Dari perspektif masyarakat, program telah berhasil meningkatkan pemahaman tentang gizi dan kesehatan anak. Namun, tantangan dalam menyamakan pemahaman antar pelaksana masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan hasil penanganan stunting.

3. Penerapan / Aplikasi

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bekasi menghadapi kompleksitas implementasi yang membutuhkan perbaikan sistematis. Kendala utama mencakup koordinasi yang belum optimal antara tingkat kabupaten hingga desa, ketidakmerataan informasi dan distribusi bantuan, serta keterbatasan pendanaan kader posyandu. Faktor geografis seperti urbanisasi dan luasnya wilayah juga mempengaruhi efektivitas program. Meski terdapat aspek positif seperti keterlibatan berbagai sektor dan strategi komunikasi perubahan perilaku yang

komprehensif, program masih memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam mekanisme koordinasi untuk mencapai hasil optimal.

c. Fluktuasi Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi

Fluktuasi prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi selama periode 2020–2023 mencerminkan keberhasilan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), terjadi penurunan signifikan dari 39,7% pada 2020 menjadi 17,8% pada 2022, menunjukkan efektivitas program dalam kurun waktu tersebut. Namun, tren ini terganggu oleh peningkatan angka stunting menjadi 23,2% pada 2023, yang melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat (21,7%) dan menjauh dari target nasional 2025 sebesar 19%.

Kenaikan ini mengindikasikan keberlanjutan program masih menghadapi hambatan signifikan. Faktor-faktor penyebab fluktuasi dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek. Keberhasilan program sebagian besar terlihat pada capaian intervensi spesifik seperti pemeriksaan ANC, pemberian

tablet tambah darah (TTD), imunisasi dasar lengkap, dan cakupan desa bebas BABS, yang telah melampaui target. Namun, beberapa program belum mencapai target, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK dan anak gizi kurang, pemberian MP-ASI, dan cakupan ASI eksklusif.

Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, dan rendahnya pengetahuan ibu serta dukungan sosial yang masih minim. Permasalahan juga terjadi pada aspek tata kelola dan monitoring program. Sistem pelaporan melalui aplikasi seperti Siga dan Elsimil sering mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat akurasi data dan evaluasi. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara pemangku kepentingan, seperti OPD, TPK, dan KUA, turut memengaruhi pelaksanaan program intervensi sensitif, termasuk edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja serta pendampingan calon pengantin.

Kendala sosial-budaya, seperti kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku

hidup sehat, juga menjadi hambatan utama. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi tantangan ini. Langkah yang direkomendasikan mencakup penguatan anggaran untuk program prioritas, perbaikan tata kelola melalui koordinasi lintas sektor yang lebih efektif, dan peningkatan kapasitas teknis aplikasi monitoring. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui program seperti Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, perlu ditingkatkan. Dengan perbaikan yang menyeluruh, diharapkan program ini mampu menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian target nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi selama 2020–2023 mencerminkan kombinasi keberhasilan awal dan tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Penurunan signifikan angka stunting pada 2020–2022 mengindikasikan efektivitas awal program, tetapi peningkatan kembali pada 2023 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga stabilitas

capaian. Fluktuasi ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan pelaksanaan program, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan. Selain itu, faktor struktural seperti terbatasnya anggaran untuk program prioritas, faktor sosial-budaya berupa rendahnya pengetahuan keluarga tentang pola asuh gizi, dan kendala teknis dalam distribusi serta monitoring data turut menjadi hambatan. Penelitian ini menyoroti kompleksitas program yang melibatkan kolaborasi pentahelix dengan berbagai indikator yang saling terkait, sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan merata.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kerja sama yang lebih erat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan optimalisasi Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting diperlukan untuk memperbaiki komunikasi, pembagian

data, dan pelaporan hasil. Selain itu, alokasi anggaran untuk program prioritas seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan distribusi MP-ASI perlu ditingkatkan agar sasaran program lebih luas tercapai. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu melalui pelatihan dan insentif juga menjadi prioritas untuk mendukung pelaksanaan program secara profesional. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi, sanitasi, dan perilaku hidup sehat harus ditingkatkan melalui kampanye masif di media lokal dan digital, dengan melibatkan komunitas seperti kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Optimalisasi teknologi, seperti aplikasi Siga dan Elsimil, diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dalam monitoring dan pelaporan, sehingga efisiensi pengumpulan data dan pengambilan keputusan berbasis bukti dapat ditingkatkan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji hubungan antara alokasi anggaran dan penurunan angka stunting, serta faktor sosial-budaya, juga disarankan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bekasi dapat mencapai hasil yang optimal dan konsisten mendukung target nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Bekasi. (2024). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi *Bps-Statistics Bekasi Regency. In Bekasi Regency in Figures* (Vol. 21).
- Beal, T. T. (2018). A review of child *stunting* determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 1-10.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. (2024). Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi 2023.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Rick Ismanto), Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018b. *Pusat Data dan Informasi*.
- Kementerian Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga*
- Masyithoh, D. N., & Kuswandi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Dahlia 10 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. *VILLAGE: Journal Rural Development And Government Studies*, 3(1), 13-21.
- Ni'mah, K. d. (2015). Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Media Gizi Indonesia*, 13-19.
- Open Data Kabupaten Bekasi, 2024.
- Paramashanti, B. H. (2016). Pemberian ASI Eksklusif Tidak Berhubungan dengan Stunting pada Anak Usia 6-23 Bulan di Indonesia. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 162-174.
- Prawirosentono, S. (1999). Manajemen Sumberdaya Manusia "Kebijakan Kinerja Karyawan" : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia . Yogyakarta: BPFE.
- Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(2), 163-174.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Perundang-Undangan

Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945

Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi